

KAJIAN KELAYAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR KOTA AMBON SEBAGAI KOTA PANTAI (AMBON WATER FRONT CITY)

Pieter Th Berhиту*, Yana Matakupan**

Abstract

Kota Ambon sebagai ibukota provinsi Maluku merupakan etalase perkembangan sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya. Kota Ambon seperti umumnya kota-kota pantai lainnya di Indonesia memiliki potensi wilayah pesisir dengan garis pantai yang panjang dan indah. Pesisir Kota Ambon saat ini kurang mendapat perhatian pemerintah dan investor dalam pembangunan. Pesisir Kota Ambon masih dianggap sebagai wilayah belakang kota, belum dilihat sebagai beranda depan kota. Sejarah Kota Ambon memperlihatkan bahwa terbentuknya pesisir Kota Ambon adalah sama tuanya dengan keberadaan kota itu sendiri. Lokasi pesisir pantai saat ini telah tumbuh dan berkembang dengan berbagai kegiatan untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan masyarakat Ambon atau masyarakat Maluku secara umum, memiliki pencapaian yang baik dan kondisi tempat yang menarik. Perhatian pada daerah pesisir diakibatkan oleh kesadaran pemerintah akan adanya "era waterfront", melihat bahwa daerah pesisir memiliki potensi, mempunyai sifat perkembangan yang dinamis dan berpeluang untuk dikembangkan. Keinginan untuk membangun dan mengembangkan pesisir pantai Kota Ambon, agar waterfront yang ada berfungsi maksimal sebagai jantung kota Ambon, pusat jasa dan perdagangan serta urat nadi pergerakan Kota. Pasca tragedi kemanusiaan, maka kebijakan pemerintah membangun pesisir adalah salah satunya untuk memunculkan "citra baru" pada Kota Ambon pasca konflik. Secara struktural area waterfront berfungsi pelayanan dan menjadi pusat orientasi. Pemanfaatan ruang pesisir dilakukan secara optimal dan menampung kegiatan utama kota. Pengembangan waterfront didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi beserta inovasi-inovasinya dapat membantu mengubah penampilan Kota Ambon sebagai kota pesisir sehingga menjadi aset baru dalam pengembangan kawasan komersial. Pembangunan waterfront harus berwawasan lingkungan dan dalam perencanaan dan penataannya harus meminimalisir konflik, sehingga setiap bagian kawasan dapat saling bersinergis dengan baik. Untuk itu makalah ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengembangan wilayah pesisir Kota Ambon sebagai Kota Pesisir dalam upaya untuk Pengembangan Pembangunan di Kota Ambon

Keywords; Pesisir Kota Ambon, Kota Pantai

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rencana Strategis Kota Ambon 2006 – 2013, menginginkan bahwa Perencanaan Pembangunan Kota dalam kaitannya dengan Pengembangan Kawasan Pesisir Kota akan diarahkan menuju pada Pengembangan kawasan pesisir menuju Kota Pantai (Kota Pesisir) atau Pengembangan Ambon Water front City. Untuk itulah maka untuk mewujudkan keinginan Rencana Strategis Kota tersebut maka perlulah dilakukan kajian-kajian dan rencana-rencana pengembangan kerah tujuan tersebut. Didalam upaya untuk merumuskan konsep perencanaan tersebut maka haruslah mengacu pada prinsip perancangan, yang mengatur tiga hal utama, yaitu : 1). Penciptaan citra atau identitas kawasan tepi air, dengan memanfaatkan berbagai karakteristik lingkungan kawasan. 2). Pembatasan intensitas di kawasan tepi air, untuk mengendalikan pembangunan dengan mempertimbangkan nilai manusia, lingkungan dan dampak pembangunan. 3). Pembatasan area di kawasan,

untuk menghindari berbagai konflik kepentingan pemanfaatan lahan. Setelah konsep dirumuskan lalu diadakan usulan zonasi kawasan tepi air sesuai dengan arahan pengembangan yang didasari karakter dan tipologi kawasan. Selanjutnya dibuat skenario pengembangan pesisir kota Ambon yang didasari atas struktur dan pola pemanfaatan lahan, lingkungan strategis, peluang pengembangan ekonomi, dukungan aksesibilitas dan infrastruktur. Setelah skenario dilanjutkan dengan penyusunan rencana tata ruang, pedoman pengendalian pembangunan dan Program investasi.

1.2 Tujuan

Yang merupakan tujuan dari kajian ini adalah;

1. Terciptanya Citra (*image*) Kota Ambon sebagai kota tepi air yang memberikan karakter visual, pendapat, pengalaman, dan kesan pada kota secara keseluruhan.
2. Terbangunnya akses pada kawasan tepi air dan memberikan jaminan adanya pencapaian yang mudah, dan kenyamanan pergerakan penduduk.

^A Pieter Th Berhиту; Dosen Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Unpatti Ambon

^{**}Yana Matakupan; Dosen Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Unpatti Ambon

3. Terwujudnya orientasi bangunan kearah tepi air sehingga tidak menjadikan tepi air sebagai halaman belakang.
4. Tersusunnya suatu konsep penataan ruang Kota Ambon setelah melalui suatu kajian layak tidaknya Ambon menjadi *Waterfront City*.

1.3 Sasaran

1. Membuat peta zonasi kawasan pesisir yang layak dikembangkan.
2. Menyusun skenario pengembangan kawasan tepi air.
3. Membuat rencana tata ruang dan peluang pengembangan ekonomi dan investasi kawasan.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

1. Karakteristik kawasan tepi air dari segi fisik alami dan ekologi pantai;
2. Karakteristik fisik binaan (pola permukiman, pemanfaatan lahan, prasarana dan sarana, sirkulasi dan transportasi, kondisi fisik pesisir);
3. Kondisi sosial budaya masyarakat dan kegiatan ekonomi di pesisir;
4. Perlakuan lingkungan oleh masyarakat dan kondisi lingkungan; Kondisi lingkungan strategis wilayah pesisir;

II. KAJIAN PUSTAKA

II.1 Pembangunan Kota-Kota Pantai.

Secara alamiah, kota yang telah tumbuh berkembang menjadi kota metropolitan dan kota modern selalu memulai kemegahannya dari tempat yang terpencil, kemudian berubah menjadi tempat pemusatan aktivitas orang-orang dan karena dianggap strategis, maka biasanya tempat strategis itu dijadikan sebagai tempat transaksi ekonomi. Ketika suatu tempat telah berkembang menjadi tempat pertukaran (transaksi ekonomi), maka kemudian tempat itu diikuti dengan berkembangnya pemukiman-pemukiman penduduk secara evolutif. Ketertarikan seperti itu dalam jangka panjang pembangunan perkotaan, penduduknya akan cepat berubah dalam memenuhi standar-standar kebutuhan individu dan sosial kearah yang lebih cepat dan efektif. Ini pula yang mendorong tumbuhnya industri modern diperkotaan, infrastruktur pendukung seperti ketersediaan energi listrik, air bersih, telekomunikasi serta jasa-jasa akan tumbuh bersamaan dengan dinamika sosial masyarakat yang menuju pada kematangan.

Dalam tinjauan ekonomi, diakui bahwa kota dapat menjadi tempat pertumbuhan (growth) karena transaksi barang dan jasa (goods and service) biasanya mengelompok dikota. Tetapi dalam jumlah penduduk

yang telah melampaui batas, (crowded) maka pertumbuhan kota tersebut akan mengalami diseconomy of scale, karena perkembangannya mulai tidak terkendali sebab dampak negatif perkotaan mulai dominan dari pada dampak positifnya. Sehingga dengan menggeser munculnya kota-kota kecil dan menengah di wilayah pesisir, maka dimungkinkan tercipta sumber pertumbuhan baru, sebagai pemicu utama dalam mendorong pembangunan kawasan terpencil. Kota di wilayah pesisir bisa memungkinkan untuk tumbuh, asalkan terdapat belt ekonomi sebagai penyangga utama pertumbuhan kota tersebut. Pembangunan kota pantai dirumuskan sebagai sistem pengembangan perkotaan dan kawasan kepulauan, yang memperlihatkan fungsi dari hirarki kota, pola prasarana kawasan yang meliputi transportasi, prasarana distribusi yang mengacu pada kondisi geografis wilayah serta pemanfaatan potensi sumberdaya alamnya, baik sumberdaya alam yang dapat pulih maupun sumberdaya alam yang tidak dapat pulih. Keduanya dikelola secara berkesinambungan. Pengelolaan sumberdaya maritim, agar tetap sustainable, maka dalam sistem pengembangannya, diupayakan memperhitungkan kearifan (wisdom) masyarakat lokal. Hal ini diupayakan agar tidak terdapat kesenjangan antara penduduk asli dengan para pendatang yang akan mendiami kota pantai.

II.2 Kota Pantai Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi

Kota pantai merupakan sebuah pusat kegiatan ekonomi, industri, perdagangan, pendidikan, pemerintahan atau mencakup semua kegiatan pengembangan ekonomi di bidang kemaritiman. Penduduk kota pantai sekurang-kurangnya dihuni oleh 500 KK dengan tingkat penghasilan berkisar Rp. 1 juta/KK/perbulan. Pendapatan sebesar itu idealnya berputar di dalam kota pantai karena didalamnya terdapat pusat perbelanjaan, pusat pendidikan (pendidikan perikanan), perbankan (BPR), fasilitas kesehatan, rekreasi, sarana olah raga, sarana hiburan, dan lain-lain. Dengan perputaran uang sebesar itu, diperkirakan kota akan tumbuh dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Disamping itu, tabungan masyarakat melalui bank lokal atau lembaga keuangan lainnya ditingkat lokal, dapat membuat kota tersebut tumbuh terus secara mandiri karena tersedianya modal masyarakat yang aksesnya tidak sulit. Komposisi pekerjaan penduduk kota pantai sangat situasional, namun dapat digunakan persentase berikut. Penangkapan sekitar 40 %, industri berbasis perikanan sekitar 25 %, budidaya 10 %, pariwisata 5 %, industri pakan 5 %, transportasi 5 %, jasa pelabuhan 5 % dan pekerjaan lain-lain 5 %. Dengan komposisi pekerjaan seperti itu, akan mampu menciptakan kota pantai

sebagai pusat pertumbuhan baru di di wilayah hinterland yang diharapkan dapat menjadi triger untuk menarik daerah sekitarnya. Kemampuan daerah kota pantai sebagai penarik atau sebagai prime mover pertumbuhan, karena tumbuhnya industri perikanan mulai dari ketersediaan armada kapal, alat tangkap, pabrik es, cold storage, pabrik pengalengan ikan, pelabuhan perikanan, pengepakan, galangan kapal dan perbengkelan tersedia di dalam kota pantai tersebut. Infrastruktur ekonomi seperti itu tumbuh dan berkembang, karena penyediaan fasilitas publik seperti air, listrik, telepon dan akses jalan.

Infrastruktur ekonomi maupun publik yang dibutuhkan dalam kota pantai dapat dilakukan oleh unsur-unsur yang terlibat (stake holders). Bagi pengusaha dapat melakukan investasi infrastruktur ekonomi, sedang keterlibatan pemerintah berupa penyediaan sarana publik dan keterlibatan masyarakat dalam bentuk produksi.

III. Metodologi Penelitian

III.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode observasi untuk mendapat kan data primer maupun sekunder kemudian dikaji untuk mendapatkan kesimpulan terhadap Kajian Kelayakan.

II.2 Lokasi studi

Lokasi Kajian secara umum meliputi wilayah Pesisir Kota Ambon yang dimulai dari wilayah Kelurahan Nusaniwe di Kecamatan Nusaniwe sampai dengan Kelurahan Rumah Tiga di Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Yang terdiri atas 3 Kecamatan, 14

Kelurahan dan 12 desa . Lokasi studi dapat dilihat pada gambar 1. di bawah ini.



Gambar 1. Lokasi Studi

III. 3. Analisa data

Data- data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisa yang antara lain adalah; Analisa Fisik dan non fisik, Kesesuaian dan kelayakan lahan, Daya dukung lingkungan, Daya tampung lingkungan, Aspek kebencanaan pada kawasan pesisir (gelombang pasang, tsunami, longsor, abrasi), Pemanfaatan ruang pesisir, Infrastruktur dan utilitas, Aksesibilitas dan transportasi, Kependudukan dan sosial budaya, Ekonomi dan peluang pengembangan ekonomi, Kondisi lingkungan strategis dan peluang pertumbuhan dan perkembangan kawasan, Kebijakan dan peraturan yang terkait.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Kajian Wilayah Dan Penetapan Kawasan Perencanaan

IV.1.1 Kecenderungan Perkembangan Kawasan Terbangun Kota Ambon

Luas Kota Ambon 359,45 km² dengan luas kawasan terbangun sebesar 32,4 km² atau 8,6% (berdasarkan Rencana Persediaan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Buku II BPN Propinsi Maluku 1996). Namun demikian sebagian besar wilayah kota ini tidak dapat dimanfaatkan untuk kawasan terbangun karena salah satu kendalanya adalah topografi kawasan yang tidak memungkinkan. Menurut Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Ambon kebijaksanaan perluasan fisik kegiatan perkotaan diarahkan ke wilayah yang belum terbangun, hal ini dimaksudkan agar perkembangan bisa merata diseluruh bagian wilayah kota. Berdasarkan kesesuaian lahan kawasan yang potensial dan layak untuk dikembangkan secara umum adalah kearah Timur. Arah perkembangan fisik Kota Ambon saat ini dapat dilihat dari kecenderungan perkembangan kawasan terbangun Kota Ambon. Dari pengamatan di lapangan dan peta penggunaan lahan yang ada, ternyata perkembangan kawasan terbangun yang cepat mengarah ke sebelah Timur mulai dari kawasan Batu Merah ke arah Galala, Passo dan Pokka mengikuti jaringan jalan menyusuri pantai. Perkembangan kawasan terbangun yang berlokasi ke arah ini antara lain untuk kegiatan permukiman, pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta industri. Khusus perkembangan kawasan terbangun ke arah daratan/perbukitan didominasi untuk kawasan permukiman, sedangkan kegiatan jasa perdagangan berlokasi sepanjang pantai di jalan arteri primer. Kawasan permukiman ini sebagian tidak sesuai dengan arahan rencana karena memanfaatkan lereng-lereng

perbukitan dengan kemiringan lebih dari 30% dan hal ini akan dapat merusak kelestarian lingkungan.

Berdasarkan arahan pengembangan kota yang tertuang dalam RUTRK, alokasi pengembangan kegiatan di Kota Ambon dapat dijelaskan sebagai berikut: a).Pembatasan pengembangan fisik pada kawasan Pusat Kota, kecuali kegiatan jasa dan perdagangan. b).Pengembangan kegiatan industri diarahkan ke Batu Gong yang pengembangannya disesuaikan dengan potensi eksisting di mana kegiatan industri terkonsentrasi.

Pengembangan areal pemukiman diarahkan sepanjang pesisir Desa Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Poka, Durian Patah, Waiheru, Nania, Negeri Lama, Passo dan membatasi pengembangan pemukiman padat pada areal yang telah padat.

IV.1.2 Fungsi dan Peranan Kawasan Pengamatan dalam Lingkup Wilayah Kota Ambon

Kawasan pengamatan yang memanjang memanjang dari Kelurahan Benteng hingga Desa Rumah Tiga sangat penting bagi wilayah Kota Ambon secara keseluruhan. Fungsi yang terdapat sepanjang kawasan ini sesuai dengan arahan pengembangan yang tertuang didalam RUTK Ambon adalah sebagai berikut:

- Pusat Pendidikan Tinggi
- Perdagangan local dan Regional
- Penelitian dan pengembangan laut, pertanian, perikanan dan perkapalan
- Industri besar, sedang dan kecil
- Pemerintahan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
- Pertahanan dan Keamanan (militer)
- Pemukiman dan Perumahan
- Pelabuhan dan jaringan transportasi utama

Dengan fungsi tersebut kawasan ini dapat berperan dan menjadi daya tarik untuk kegiatan-kegiatan perkotaan seperti untuk perdagangan, perkantoran, pendidikan dan perumahan. Di lain pihak terdapat kawasan-kawasan yang perlu dilindungi dan dilestarikan keberadaannya.

IV.2 Karakteristik Fisik Kawasan

Tinjauan keadaan karakteristik fisik kawasan pengamatan, dalam hal ini meliputi tinjauan fisik dasar dan pola penggunaan lahan eksisting.

IV.2.1. Fisik Dasar

1. Topografi

Keadaan Topografi di kawasan pengamatan dapat dikelompokkan 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Topografi relatif datar, terdapat di kawasan sepanjang pantai Teluk Dalam dengan radius sampai 500 m dan garis pantai, dengan ketinggian bervariasi

dan 0 -- 20 m dan permukaan laut dan kemiringan 0 -- 10 %,

- b. Topografi landai sampai miring, terdapat pada kawasan lebih ke atas dengan ketinggian antara 20 -- 30 m dan permukaan laut, yang sebagian besar kemiringan 10 -- 20%,
- c. Topografi bergelombang/berbukit terjal, terdapat pada kawasan dengan ketinggian antara 20 - 50 m dan permukaan laut, dengan kemiringan 20 -- 30%,
- d. Topografi pegunungan (amat terjal), terdapat di kawasan pegunungan dengan ketinggian > 50 m dan permukaan laut dan kemiringan > 30%,

Dilihat dari kondisi topografi tersebut, daerah yang paling potensial untuk penggunaan budidaya non pertanian adalah daerah sepanjang pantai.

2. Geologi

Pulau Ambon pada umumnya dibentuk oleh batuan endapan permukaan jenis aluvium yang merupakan endapan pantai, sungal dan rawa yang subur bagi tanaman/pertanian. Kemudian batuan sedimen berupa batu gamping, korat serta batuan gunung berapi seperti lava breksi, breksi tutaan dan lava andesit. Jenis batuan material lepas yang merupakan hasil endapan gunung berapi ini, pada umumnya digunakan untuk kebun campuran, pemukiman, ladang, tegalan dan sebagian berupa alang-alang. Untuk di kawasan pengamatan, jenis batuan yang dominan berupa batuan gunung api yang terdapat di daerah dengan ketinggian >50 meter dan permukaan laut, dan batuan gamping yang terdapat pada daerah dengan ketinggian antara 20-70 m dan permukaan laut, dan batuan endapan permukaan yaitu aluvium berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau, lempung dan sisa tumbuhan yang terdapat pada daerah dekat pesisir pantai atau pada daerah dengan ketinggian antara 0 -- 20 meter dan permukaan laut.

3. Hidrologi dan Hidrogeologi

Tinjauan tentang kondisi hidrologi dan hidrogeologi di Kota Ambon pada umumnya dan khususnya untuk di kawasan pengamatan, dalam hal ini terbagi atas kondisi air permukaan, mata air dan air tanah.

a. Air Permukaan

Kawasan pengamatan dilalui oleh beberapa sungai yang mengalir ke arah Teluk Ambon dan Teluk Dalam. Adapun sungai-sungai dimaksud dan terbilang cukup besar serta beberapa diantaranya merupakan batas administrasi dan desa/kelurahan, adalah:

- Way Gurita (Kelurahan Lateri dengan Desa Passo)
- Way Tonahitu (Desa Passo dengan Desa Negeri lama & Desa Nania)

- Way Sala (Desa Negeri Lama & Desa Nania dengan Desa Waiheru)
- Way lila (Desa Waiheru dengan Desa Hunuth/DP)
- Way Guru-guru (Desa Hunuth/DP dengan Desa Poka)
- Way Maspait (Desa Poka dengan Desa Rumah Tiga)
- Way Ruhu (Desa Hative Kecil dan Desa Galala)

Sungai-sungai tersebut sebagian besar digunakan oleh penduduk yang bermukim sepanjang jalur sungai untuk keperluan mandi dan cuci, selain itu berfungsi pula sebagai saluran drainase dan tempat pembuangan limbah rumah tangga. Keadaan sungai-sungai tersebut pada umumnya sudah mengalami proses pendangkalan akibat endapan pasir. Pendangkalan sungai tersebut sebagian diakibatkan oleh adanya penggunaan tanah non pertanian di kawasan penyangga dan areal konservasi yang kurang memperhatikan faktor-faktor yang bisa menimbulkan kerusakan tanah. Akibat dan tidak terjaganya kawasan resapan air maka fluktuasi debit sungai pada musim kemarau dan musim hujan cukup besar, sehingga pada kawasan tertentu sering terjadi banjir dan pada musim kemarau panjang sering mengalami kekeringan.

b. Mata Air

Sumber air baku berupa mata air yang terdapat di kawasan pengamatan, yaitu Mata Air Wai Pompa (kapasitas 25 liter/ldt) terdapat di Desa Halong yang sudah dimanfaatkan oleh PDAM Kota Ambon dengan daerah pelayan untuk Desa Halong dan Desa Hative Kecil. Selain mata air Wai Pompa, terdapat mata air lainnya yang cukup potensial dan belum dimanfaatkan, seperti MA. Halong dan MA. Waiheru. Umumnya debit mata air yang ada tersebut sangat berfluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau. Debit pada musim kemarau hanya sekitar 60% dan debit pada musim hujan. Dilihat dari segi kualitas, mata air tersebut diatas, secara fisik umumnya relatif bagus.

c. Air Tanah

Pada daerah-daerah yang relatif datar banyak terdapat air tanah dangkal yang kedalamannya bervariasi antara 1-5 meter. Air tanah dangkal ini yang umumnya berupa sumur/perigi banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat yang tidak terlayani oleh jaringan air minum yang ada (PDAM) untuk keperluan sehari-hari seperti untuk mandi, cuci dan memasak. Namun demikian, umumnya air tanah dangkal ini kondisinya (kualitasnya) kurang baik, yaitu sudah banyak yang tercemar oleh bakteri coli. Sementara itu untuk air tanah dalam banyak terdapat pada tingkat kedalaman lebih dan 50 meter dan kondisinya relatif cukup baik.

4. Iklim

Iklim di Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh kondisi laut dan musim yang berlangsung di wilayah tersebut. Hal ini dapat dipahami karena selain letak kota tersebut berada pada suatu pulau yang dikelilingi perairan laut/samudera juga dikarenakan dalam periode tertentu terjadi perputaran arah angin yang bertiup (terutama yang dari arah lautan ke daratan). Oleh karenanya iklim Kota Ambon termasuk iklim laut tropis dan iklim musim. Iklim musim yang dimaksud adalah musim Barat (Utara) dan musim Timur (Tenggara), yang diantaranya diselingi oleh musim Pancaroba.

Berdasarkan data yang tercatat di Stasiun Meteorologi Ambon (di Lanud Pattimura), ternyata curah hujan di wilayah Kota Ambon selama periode tahun 1993 -- 1997 cukup tinggi, yaitu sebesar 14.096,4 mm atau rata-rata 2.819 mm/tahun, dan jumlah hari hujan tercatat sekitar 1.085 hari atau rata-rata hari hujan 217 hari per tahun (18,1 hari per bulan). Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 1996 yaitu sebesar 4.494,6 mm dan terendah pada tahun 1993 yaitu sebesar 1.865,2 mm. Sedangkan ditinjau per bulan, ternyata curah tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu rata-rata sebesar 487,9 mm, dan curah hujan terendah terjadi pada bulan September yaitu rata-rata sebesar 82,7 mm. Kemudian jumlah hari hujan terbanyak ternyata pada bulan Juni yaitu rata-rata 24,2 hari dan paling sedikit hari hujan terjadi pada bulan Nopember, yaitu 9,8 hari. Jadi musim hujan terjadi di Kota Ambon antara bulan April-Agustus, sedangkan saat kemarau berlangsung antara bulan September - Maret.

Sementara itu berdasarkan data tahun 1997, kondisi Suhu di Kota Ambon berkisar antara 25,9°C – 26,4°C, dengan Kelembaban Nisbi sekitar 83,8% dan rata-rata lamanya penyinaran Matahari adalah 1.010 mb, sedangkan Kecepatan Angin berkisar antara 3,1 - 3,9 knot atau rata-rata 3 45 knot per bulan.

IV.2.2. Pola Penggunaan Lahan Eksisting

Penggunaan lahan di kawasan pengamatan saat ini dapat di bedakan atas 2 (dua) fungsi utama kawasan. yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kedua kelompok penggunaan tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut.

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan. Kawasan ini terdiri dan kawasan lindung yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan lindung setempat. Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya seperti hutan lebat atau kawasan-kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2 000 m dpi atau kawasan yang terletak pada kemiringan lereng >30%, atau daerah

resapan air. kawasan lindung setempat seperti sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar mata air.

2. Kawasan Budidaya:

- Kawasan budidaya pertanian, antara lain sawah, ladang/tegalan, perkebunan, hutan belukar dan lain-lain.
- Kawasan budidaya bukan pertanian antara lain perumahan, industri, perkantoran, perdagangan, peribadatan dan sebagainya

Jenis dan luas penggunaan lahan di kawasan pengamatan yang mencakup 13 desa/kelurahan dengan total luas 526,06 Ha, berdasarkan data hasil daftar pertanyaan dalam buku SP 2000-PODES Badan Pusat Statistik, ternyata seluruhnya merupakan penggunaan lahan bukan sawah, sedangkan lahan sawah tidak terdapat di kawasan ini

Data sampai akhir tahun 2008, ternyata sebagian besar penggunaan lahan atau sekitar 28,40% (2.137,22 Ha) adalah kategori penggunaan lainnya yang berupa areal hutan lebat dan belukar, alang-alang dan sejenisnya, kawasan tertentu (pendidikan tinggi dan militer), kawasan perusahaan perikanan dan perkebunan. Kemudian penggunaan kedua terbesar berupa kebun/perkebunan milik sendiri sekitar 25,83% (1.944,00 Ha), selanjutnya adalah lahan yang sementara ini tidak diusahakan atau lahan tidur sekitar 20,50% (1.542,71 Ha), penggunaan berikutnya kawasan terbangun berupa perumahan/permukiman dan lahan untuk bangunan lainnya (industri/perkantoran/pertokoan) sebesar 15,43% (1161,63 Ha), selebihnya dimanfaatkan untuk ladang/huma/tegalan/kebun campuran sebesar 9,84% (740,50 Ha).

Dilihat dari kondisi saat ini sebagian kawasan lindung sudah rusak, ada yang gundul, akibat kebakaran ebagian hanya ditumbuhi alang-alang. Hutan bakau sepanjang pantai juga ada yang rusak. Hal ini berakibat ketersediaan air pada musim kemarau sangat langka, banyak sumur-sumur penduduk yang kering.

Berdasarkan data sampai akhir tahun 1999, penggunaan lahan terbangun berupa lahan perumahan dan pemukiman, terluas adalah di Desa Rumah Tiga (252 Ha), kemudian di Desa Passo (190 Ha), Desa Halong (161,09 Ha) dan di Desa Hative Kecil (132,56 Ha), sedangkan penggunaan lahan terbangun non perumahan & permukiman, yang terluas masih berada di Desa Rumah Tiga (10 Ha), kemudian di Desa Passo (6 Ha), di Kelurahan Lateri dan Desa Poka masing-masing seluas 5 Ha. Pada penggunaan lahan yang tidak terbangun, seperti penggunaan lainnya berupa hutan/semak belukar, kawasan tertentu (pendidikan tinggi dan militer) dan lainnya serta lahan yang sementara tidak diusahakan, penggunaannya memiliki

luas terbesar (48,90%) dibandingkan untuk penggunaan lahan kebun (25,83%). Penggunaan lahan lainnya dan sementara tidak diusahakan/lahan tidur, ternyata paling terbesar terdapat di Desa Rumah Tiga seluas 1.329 Ha, kemudian di Desa Halong sekitar 926,91 Ha, di Desa Negeri Lama 408,50 Ha, dan di Desa Waiheru seluas 469 Ha, dan kondisi kebalikannya untuk Kelurahan Tihu, Desa Nania, Desa Latta dan Desa Hative Kecil luas penggunaannya relatif kecil. Untuk penggunaan lahan ladang/huma/tegalan, Desa Rumah Tiga adalah yang terbesar (550 Ha), Sedangkan Desa Nania, Kelurahan Tihu, dan Desa Galala, tidak ada penggunaan lahan ini. Dari Uraian di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar lahan di Kawasan Pengamatan belum diusahakan/dibudidayakan secara optimal, terutama pembudidayaan lahan yang potensial sesuai bagi kegiatan pertanian.

Kawasan terbangun yang terjadi saat ini secara umum memperlihatkan bentuk/pola linier melingkar sepanjang pesisir Pantai Teluk Ambon dan Teluk Dalam. Pola lingkungan permukiman / kawasan perumahan yang banyak dibangun saat ini adalah berpola grid, yang dalam perkembangannya pembangunan kawasan perumahan tersebut cenderung memanfaatkan daerah-daerah perbukitan yang terletak pada kemiringan lereng antara 15-30%. Keadaan ini perlu diwaspadai, untuk mencegah terjadinya penurunan daya dukung/kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang lebih kontinu terhadap segala bentuk kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan dalam skala besar. Selain itu berdasarkan informasi terakhir banyak terdapat kawasan permukiman yang terbakar sebagai akibat dan kerusakan yang terjadi/berlangsung di wilayah Propinsi Maluku dan khususnya di wilayah Kota Ambon, termasuk di beberapa kawasan desa/kelurahan yang ada di kawasan pengamatan.

IV.3. Kemampuan, Kesesuaian dan Daya Tampung Lahan

1. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan kimiawi dari lahan tersebut, diantaranya dan jenis tanah, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, permeabilitas, kemiringan lahan/lereng, tingkat erosi, drainase, pH tanah, kesuburan tanah/unsur hara dan faktor pembatas seperti tingkat intrusi air laut, ketebalan jenis batuan, kondisi air tanah, dan lainnya.

Kemampuan lahan adalah daya dukung lahan bagi pengembangan kawasan budidaya, khusus untuk kajian kawasan pengamatan lebih ditekankan pada kegiatan perkotaan, dengan mengkaji kondisi aspek tersebut diatas melalui proses superimpose/tumpang tindih dan beberapa peta seperti peta topografi, geologi, jenis tanah, ketersediaan air tanah dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penilaian menunjukkan bahwa kawasan pengamatan memiliki tingkat kemampuan lahan yang tergolong rendah sampai sedang. Hal ini dikarenakan kawasan pengamatan tersebut

- Dilihat dan struktur geologinya, sebagian besar terletak pada daerah yang terbentuk dari jenis batuan gunung api Ambon dan batuan gamping koral yang secara morfologi berupa pebukitan berelief halus hingga kasar.
- Sebagian besar wilayahnya berada pada kemiringan lereng 10% - 30% dan >30%, yang memerlukan batasan-batasan dalam pengembangannya.
- Penggunaan tanahnya sebagian besar berupa hutan belukar, hutan lebat, hutan alang-alang dan hanya sebagian kecil saja (setempat) yang telah dimanfaatkan sebagai daerah terbangun. Selebihnya berada pada daerah dengan kemiringan antara 0 - 10% yang terbentuk dari jenis batuan aluvium dan jenis material lepas sebagai hasil endapan gunung berapi, dan pada kedua daerah jenis batuan tersebut telah digunakan sebagai daerah terbangun perkotaan, lahan pertanian tanah kering atau tegalan, kebun campuran dan lahan konservasi.
- Sebagian besar memiliki kecenderungan tingkat erosi permukaan dan kuat sampai sedang, kecuali pada daerah relatif datar erosi permukaan rendah.
- Umumnya tingkat permeabilitas/daya resap tanah 30-90 cm, tekstur tanah pasir, dan pH tanah berkisar 1-7, kedalaman efektif tanah 0,3-2 m, bertekstur butiran, gumpal-halus. Permukaan air tanah bebas dangkal-sedang dengan kedalaman 1 - 6 m hanya terdapat di daerah yang relatif datar (pada daerah aluvium), kedalaman antara 3 sampai >10 m terdapat pada daerah yang relatif landai (pada daerah material lepas), sedangkan pada daerah miring-terjal sampai amat terjal (pada daerah batuan gamping koral) tidak terdapat atau sangat sulit diperoleh.

2. Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kesesuaian pemanfaatan lahan untuk fungsi lindung dan pengembangan fungsi budidaya sesuai dengan tingkat kemampuan atau daya dukung lahan serta jenis vegetasi yang dikembangkan.

Berdasarkan kondisi kemampuan lahan sebagaimana uraian sebelumnya di atas, selanjutnya dengan metode tumpang tindih (superimposed) peta kemampuan/kondisi lahan, peta geologi, peta hidrologi dan peta penggunaan lahan eksisting, maka dapat ditentukan atau deliniasi lahan-lahan potensial (efektif) yang sesuai bagi penggunaan tertentu dan diuraikan sebagai berikut:

- Pada daerah dengan kemiringan 0-8% dengan kesuburan tanah sedang, kedalaman tanah sedang, gejala erosi masih ringan, dibentuk oleh satuan

batuan aluvium, material lepas dan batuan gamping. Daerah ini sesuai dan tetap dipertahankan sebagai daerah permukiman atau terbangun dengan memperhatikan konservasi (sempadan) pantai dan sungai

- Pada daerah dengan kemiringan 8-15% mempunyai tingkat erosi rendah hingga sedang dengan penggunaan lahan terbangun selain perkebunan. Daerah ini tetap dipertahankan sebagai lahan usaha/perkebunan selain sebagai pengembangan lahan terbangun dan yang sudah ada.
- Pada daerah dengan kemiringan 15-30% penggunaan lahan didominasi oleh tanaman keras/perkebunan lahan kering, memiliki pembatas-pembatas yang sangat teliti, karena bahaya erosi cukup besar dan struktur tanah tidak mantap. Daerah ini dibentuk oleh batuan batu gamping dan material lepas. Daerah ini sesuai dengan kendala topografi dan pada daerah-daerah yang di cut tidak melakukan kerusakan ekosistem, dengan demikian maka daerah ini tetap dipertahankan sebagai lahan perkebunan yang merupakan lahan usaha masyarakat.
- Pada daerah dengan kemiringan 30 - 40% dengan kendala tanah dangkal dan mempunyai tingkat erosi tinggi. Daerah ini dibentuk oleh satuan batu gamping, material lepas, andesit, daset dan metafir. Dengan keterbatasan yang dimiliki, maka daerah ini akan tetap dipertahankan sebagai lahan hijau untuk keseimbangan ekosistem atau sebagai daerah penyangga atau tidak boleh dikembangkan untuk wilayah terbangun.
- Pada daerah dengan kemiringan >40% selain kelangkaan tanah dangkal, berlereng cukup terjal dan mempunyai kepekaan terhadap erosi yang sangat tinggi. Daerah ini akan tetap dipertahankan sebagai lahan hutan lindung selain daerah-daerah disepanjang sungai dan pantai sebagai jalur hijau.

Berdasarkan gambaran kemampuan dan kesesuaian lahan serta memperhatikan faktor-faktor fisik pembatas pengembangan kawasan pengamatan serta lahan terbangun yang ada, maka dapat diketahui berapa besar lahan efektif/potensial yang dapat digunakan dan daya tampung lahan.

Dalam kawasan pengamatan terdapat lahan yang sudah terbangun, serta lahan efektif dan lahan yang tidak efektif untuk dikembangkan. Dan data tahun 1999, diketahui bahwa luas penggunaan lahan terbangun yang ada sebesar 15,43% (1.161,63Ha) dan luas total kawasan, yang artinya penggunaan lahan terbangun masih sangat kecil. Penggunaan lahan terbangun terbesar terdapat di Desa Rumah Tiga (262 Ha), Desa Passo (196 Ha), Desa Halong (164,09 Ha) dan Desa Hative Kecil (132,56 Ha). Sedangkan untuk penggunaan lahan terkecil terdapat di Desa Latta (4 Ha).

Total luas lahan efektif yang ada di kawasan pengamatan dan layak untuk dikembangkan adalah sekitar 17,40% (1.309,55 Ha) dari total kawasan. Lahan efektif yang relatif luas terdapat di Desa Halong (288,94 Ha), Desa Passo (216,36 Ha), Desa Rumah Tiga (205,11 Ha), Desa Hunuth/DP (147,37 Ha), Desa Negeri Lama (138,66 Ha), dan Desa Waiheru (120,60 Ha). Sedangkan yang tidak memiliki lahan yang efektif adalah Desa Galala, Desa Latta, Desa Nania dan Kelurahan Tihu, yang kondisi pada saat ini sebagian besar adalah lahan terbangun.

3. Daya Tampung Lahan

Analisis daya tampung lahan diperlukan untuk mengetahui kemampuan suatu wilayah/kawasan dalam menampung jumlah penduduk secara maksimal agar tercipta suatu keseimbangan pemanfaatan lahan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam menentukan daya tampung lahan kawasan pengamatan adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan lahan efektif
- Penentuan mengenai luas kapling perumahan per kepala keluarga
- Rencana kepadatan penduduk.

Tabel 1. Luas Lahan Terbangun Tahun 2008 2008

No	Desa / Kelurahan	Luas Lahan (Ha)	Lahan Terbangun (Ha)	Lahan Efektif (Ha)	Lahan Non Efektif (Ha)
1		2.839,0			2.371,8
2	Rumah Tiga	0	262,00	20511	9
3	Poka	278,00	96,00	74,20	107,80
4	Kelurahan Tihu	33,00	32,00	1,00	0,00
5	Hunuth/DP	200,00	30,28	147,37	22,35
6	Waiheru	60000	97,00	120,60	382,40
7	Nania	12,00	11,00	0,00	1,00
8	Negeri Lama	450,00	26,50	138,66	284,84
9	Passo	1.138,0	196,00	216,36	725,64
10	Kelurahan Lateri	0	98,20	66,43	36,37
11	Latta	1000	4,00	0,00	6,00
12	Halong	1.600,0	164,09	288,94	1.146,9
13	Hative Kecil Galala	0	132,56	10,53	7
		15306	12,00	0,00	9,97
		1200			0,00
Kawasan Pengamatan		7.526,0	1.161,63	1.269,2	5.095,2
Prosentase (%)		6	15,43	0	3
		100,00		16,86	67,70

Penentuan luas kapling perumahan per kepala keluarga dan rencana kepadatan penduduk mengacu pada arahan rencana yang tertuang dalam RUTR Kota Ambon. Pada kawasan pengamatan dibedakan atas dua bagian, yakni

1. Kawasan transisi pusat kota dan kawasan utama pusat sub wilayah yang mempunyai fungsi permukiman kota, pusat perdagangan lokal, pusat pendidikan, pengembangan kegiatan jasa ekonomi dengan tingkat kepadatan antara 150-200 jiwa/ha dan luas kapling/KK sebesar 250 m². Kawasan ini meliputi Desa Rumah Tiga, Desa Poka, Desa Passo, Kelurahan Lateri dan Kelurahan Tihu.
2. Kawasan pinggiran pusat kota dan kawasan transisi pada sub pusat wilayah maksimum dengan tingkat kepadatan antara 100-150 jiwa/ha dengan luas kapling/KK sebesar 350 m². Kawasan ini meliputi Desa Galala, Desa Hative Kecil, Desa Halong, Desa Latta, Desa Negeri Lama, Desa Nania, Desa Waiheru dan Desa Hunuth/DP.

Untuk mengetahui daya tampung lahan (DTL) di kawasan pengamatan digunakan formula sebagai berikut:

$$DTL = \frac{\text{Luas Lahan Efektif} - (\text{Fasilitas} + \text{Jalan})}{\text{Luas Kapling Perumahan}} \times \frac{5}{\text{KK}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan (lihat Tabel 1), dapat diketahui bahwa luas lahan efektif untuk kawasan pengamatan sebesar 1.269,20 Ha, terbesar berada di Desa Halong (288,94 Ha) dan Desa Passo (216,36 Ha). Lahan efektif yang ada sebagian besar diperuntukkan sebagai lahan perumahan yakni sebesar 761,52Ha, selebihnya untuk fasilitas umum (sosial, ekonomi) sebesar 3.17,30 Ha dan fasilitas jalan sebesar 190,38 Ha. Total penduduk yang dapat ditampung di kawasan ini sebesar (128.095) jiwa atau 25.619 KK, terbesar terdapat di Desa Passo sekitar 25.963 jiwa dan terkecil di Kelurahan Tihu sekitar 120 jiwa, sementara untuk Desa Galala, Desa Latta dan Desa Nania diprediksikan tidak dapat menampung penduduk lagi mengingat lahan tersedia sudah terbangun semuanya.

Tabel 2. Lahan Efektif Dan Daya Tampung Kawasan Pesisir Teluk Dalam Ambon

No	Desa / Kelurahan	Lahan Efektif (Ha)	Arahan Penggunaan Lahan (Ha)			Daya Tampung	
			Fasilitas	Jalan	Perumahan	Jiwa	KK
1	Rumah flga	20511	5128	30.77	123,07	24,613	4.923
2	Poka	74,20	18,55	11,13	44,52	8.904	1.781
3	Kelurahan Tihu	1,00	0,25	0,15	0,60	120	24
4	Hunuth)DP	147,37	36,84	22,11	88,42	12.632	2.526
5	Waheru	120,60	30,15	18,09	72,36	10.337	2.067
6	Nania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Negeri Lama	138,66	34,67	20,80	83,20	11.885	2.377
8	Passo	216,36	54,09	32,45	129,82	25.963	5.193
9	eturahan Lateri	66,43	16,61	9,96	39,86	7.972	1.594
10	L a I t a	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Halong	288,94	72,24	43,34	173,36	24.766	4.953
12	Hative Keci	10,53	263	1,58	6,32	903	181
13	Galala	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Kawasan Pengamatan		1.269,20	317,30	190,38	761,52	128.095	25.619

Hasil Analisis, Tahun 2000

IV.4 Daya Dukung Sosial Budaya

Adapun daya dukung sosial budaya yang ada di pulau Ambon dimana dapat terbagi dalam lima wilayah kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Nusaniwe
2. Kecamatan Sirimau
3. Kecamatan Teluk Ambon Baguala
4. Kecamatan Teluk Ambon dan
5. Kecamatan Leitimur Selatan

Dari kelima kecamatan tersebut terdapat berbagai macam suku, ras dan budaya serta berbagai agama antara lain Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu dengan beragam sosial budayanya sesuai dengan lingkungan dan kultur dari masing-masing kecamatan tersebut.

Pada kelima kecamatan tersebut daya dukung sosial budaya adalah sebagai berikut : Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Agama.

A. Kecamatan Nusaniwe

Pada kecamatan ini yang termasuk di dalamnya adalah : Kelurahan Nusaniwe, Kelurahan Benteng, Kelurahan Wainitu, dan Kelurahan Waihaong yang termasuk di dalam lokasi pengamatan pada bahagian pesisir pantai.

Jumlah Sekolah Dasar (SD) pada kelurahan-kelurahan tersebut tadi berjumlah sebanyak 16 buah SD Negeri dan 1 buah Sekolah Dasar Swasta, dengan perincian murid sebagai berikut : SD Negeri 2834 murid dan 110 murid pada SD Swasta.

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada pada kelurahan-kelurahan tersebut jumlahnya 3 buah SLTP Negeri dengan banyaknya murid 1977 murid, dan 3 buah SLTP Swasta dengan jumlah murid 573 murid.

Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA / K) dengan perincian sebagai berikut, SMA Negeri berjumlah 5 buah dengan jumlah murid 1109 murid, SMK berjumlah 2 buah dengan jumlah murid 571 murid.

Selain dari status pendidikan tersebut di atas terdapat pula pendidikan di luar Depdiknas yang dikelola oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Pertahanan, seperti Akademi Perawat Kesehatan dan Politeknik Kesehatan Ambon dengan jumlah mahasiswanya 416 mahasiswa, untuk Akademi Perawat Kesehatan dan Politeknik Kesehatan berjumlah 1005 orang mahasiswa.

Lagi pula pada kecamatan ini terdapat satu-satunya Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1484 orang mahasiswa.

❖ Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Tujuan pembangunan pada sektor kesehatan dilakukan Pemerintah pada hakekatnya agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh layanan kesehatan secara merata dan dengan harga yang relatif murah.

Dimana dalam rangka tercapainya tujuan tersebut, maka di dalam pembangunan di sektor kesehatan pada kecamatan ini dari tahun ke tahun diarahkan pada perbaikan dan peningkatan berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan baik kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan dari masyarakat.

❖ Bidang Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan Pemerintah merupakan salah satu upaya mengendalikan angka kelahiran diantaranya melalui penggunaan alat kontrasepsi secara teratur dan berkesinambungan terutama bagi pasangan usia subur.

Dan keberhasilan ini menunjukkan peran serta BKKBPB dalam memberi motivasi kepada masyarakat demi tercapainya salah satu program pembangunan nasional.

❖ Bidang Agama

Di dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia pada umumnya dan Maluku serta masyarakat Ambon pada khususnya, maka sudah tentu faktor kehidupan beragama merupakan salah satu pilihan untuk dibina dan dikembangkan.

Karena melalui kehidupan beragama yang baik akan melahirkan manusia-manusia yang bermental yang baik.

Hal ini terdapat dalam kehidupan beragama di kecamatan Nusaniwe ini yang terdiri dari berbagai golongan masyarakat.

B. Kecamatan Sirimau

Pada kecamatan ini yang termasuk didalamnya adalah : Desa Batu Merah, Kelurahan Pandan Kasturi, Desa Galala, dan Desa Hative Kecil.

Daerah-daerah tersebut adalah daerah pesisir yang terletak pada pesisir pantai.

Jumlah sarana pendidikan sebagai berikut : Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 13 buah dengan jumlah murid 2729 orang, SD Swasta 4 buah dengan jumlah murid 1000 orang, SD Inpres 5 buah dengan jumlah murid 1841 orang.

Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 3 buah dengan jumlah murid 1927 orang, dan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri berjumlah 3 buah dengan jumlah murid 2883 orang murid.

Selain sarana SD, SMP, SMA, juga terdapat satu buah Institusi Agama Islam negeri dan Sekolah Tinggi Agama Islam, dimana pada IAIN jumlah mahasiswa 2952 orang mahasiswa dan STAIN jumlah mahasiswa 674 orang.

❖ **Bidang Kesehatan**

Pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah pada tujuannya agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dengan harga yang relatif murah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud maka pembangunan pada sektor kesehatan di desa-desa tersebut tadi yang berada di dalam kecamatan ini dari tahun ke tahun diarahkan kepada perbaikan dan peningkatan berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

❖ **Keluarga Berencana**

Pada program ini (KB) yang dicanangkan Pemerintah merupakan salah satu upaya mengendalikan angka kelahiran diantaranya melalui penggunaan alat kontrasepsi secara teratur dan berkesinambungan. Maka dengan meningkatnya pelayanan KB pada kecamatan ini, telah memberi motivasi yang besar bagi kalangan pasangan usia subur.

❖ **Bidang Agama**

Di dalam upaya peningkatan kualitas manusia dewasa ini, maka sudah tentu faktor kehidupan beragama merupakan salah satu pilihan untuk dibina dan dikembangkan. Karena melalui kehidupan beragama yang baik akan melahirkan manusia-manusia yang bermental yang baik.

Pada keempat desa tadi masyarakat menganut agama yang beragam antara lain : Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.

C. Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Pada kecamatan ini adapun desa-desa dan kelurahan yang termasuk didalamnya adalah : desa Halong, desa Latta, kelurahan Lateri dan desa Passo, semuanya terletak pada bagian pesisir pantai.

Dimana daya dukung sosial dan budaya pada desa-desa dan kelurahan tersebut adalah :

❖ **Pendidikan**

Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri yang terdapat pada tiga desa dan satu kelurahan adalah 23 buah dengan jumlah murid 3612 orang.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri adalah 5 buah dengan jumlah murid 1448 orang.

Sekolah Menengah Atas atau Umum (SMU) Negeri adalah 5 buah dengan jumlah murid 1221 orang.

❖ **Kesehatan**

Pada sektor kesehatan merupakan faktor yang sangat penting yang perlu perhatian pemerintah, agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dengan harga yang relatif murah.

Adapun pembangunan kesehatan yang dilaksanakan pada daerah-daerah ini mencakup perbaikan dan peningkatan berbagai sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat itu sendiri, seperti Rumah Sakit, Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.

❖ **Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan Pemerintah adalah merupakan salah satu upaya mengendalikan angka kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi secara berkesinambungan.

Pelayanan Keluarga Berencana pada kecamatan ini telah memberikan motivasi yang besar bagi kalangan pasangan usia subur.

❖ **Agama**

Kehidupan masyarakat di kecamatan ini memiliki tingkat kerukunan dan toleransi yang sangat tinggi walaupun terdiri dari berbagai golongan agama antara lain : Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.

D. Kecamatan Teluk Ambon

Pada kecamatan ini desa-desa yang termasuk didalamnya adalah : desa Negeri Lama, desa Nania, desa Waiheru, desa Hunuth, desa Poka dan desa Rumah Tiga.

Jumlah sarana pendidikan yang terdapat pada kecamatan ini terdiri antara lain : Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 23 buah dengan jumlah murid 3783 orang.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 6 buah dengan jumlah murid 1774 orang.

Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA / K) berjumlah 5 buah dengan jumlah murid 1833 orang.

Lagi pula pada kecamatan ini terdapat Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Pattimura.

❖ **Kesehatan**

Kesehatan juga merupakan faktor yang sangat penting dan perlu perhatian pemerintah saat ini, agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan harga relatif murah.

❖ **Keluarga Berencana**

Melalui kegiatan program ini merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan angka kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi secara teratur dan berkesinambungan. Pada kecamatan ini telah banyak memberikan motivasi yang sangat positif dan besar bagi kalangan pasangan usia subur.

IV..5 Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat

Propinsi Maluku pada umumnya dan pulau Ambon secara khususnya terdiri dari berbagai etnis, suku dan agama, serta berbagai budaya. Masyarakat pada pulau Ambon dengan mata pencaharian yang ditekuninya adalah pertanian, perikanan, perdagangan, wiraswasta dan sebagian besar adalah pegawai negeri (PNS).

Secara umum budaya yang terdapat di pulau Ambon terdiri dari cukup banyaknya bahasa daerah yang dipergunakan oleh masyarakat, dan masih aktif terdapat di kalangan masyarakat pulau Ambon.

Lagi pula potensi sumber daya alamnya yang dimiliki cukup besar serta sumber daya lautnya yang sangat potensial.

Dimana ekonomi masyarakat khusus kota Ambon sangat sederhana yang didasarkan pada pengumpulan hasil-hasil hutan maupun hasil lautnya guna kehidupan masyarakat.

Dari sisi budaya masyarakat pulau Ambon dikenal dengan istilah Pela-Gandong.

Adat istiadat ini yang berlaku di masyarakat pulau Ambon, pulau Lease dan pulau Seram, dewasa ini berhubung dengan faktor-faktor waktu, tempat dan pertukaran generasi.

Dari sejarah susunan masyarakat, letak, iklim, struktur rohani masyarakat dan sebagainya telah mengakibatkan adat istiadat cenderung membedakan satu sama lainnya.

Dari hasil inventarisasi lapangan pada semua negeri atau desa di pulau Ambon telah ditemukan tiga hal yang menarik antara lain :

1. Di pulau Ambon hanya ada 2 – 3 desa atau negeri yang tidak mempunyai hubungan perserikatan dengan desa atau negeri-negeri lain di pulau Ambon.

2. Bentuk-bentuk perserikatan antara desa atau negeri-negeri biasanya disebut dengan sebutan Pela.

3. Sifat-sifat perserikatan antara desa atau negeri-negeri adalah persaudaraan sekandung sejati.

Dan berdasarkan hasil inventarisasi, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pela Gandong adalah : Perserikatan antara satu negeri atau desa di pulau Ambon dengan satu atau beberapa negeri atau desa lain dalam pulau Ambon, pulau Lease dan pulau Seram.

Disinilah merupakan budaya yang sangat erat di dalam masyarakat di pulau Ambon, walaupun berbagai agama tetapi sudah merupakan suatu perjanjian baik lisan maupun tulisan, dimana para pihak berjanji untuk tunduk pada perjanjian dimaksud sebagai dasar hukum bagi implementasinya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 dan implementasinya melalui peraturan daerah nomor 01 sampai 06 tahun 1981, maka dengan demikian penyebarluasan informasi tentang Pela Gandong ini harus mampu memberikan refleksi yang berkaitan dengan konteks situasi yang mengelilingi negeri-negeri Pela Gandong itu sendiri.

Harapan terhadap budaya Pela Gandong ini tidaklah terletak pada masalah kerukunan hidup umat beragama saja, tetapi walaupun hal itu juga amat berguna, melainkan lahirnya pemahaman bahwa kelangsungan hidup rukun antara umat beragama amat bergantung kepada kemampuan untuk belajar. Sekaligus memberikan jawaban antisipatif terhadap perkembangan yang sedang dan yang akan dihadapi.

Salah satu hal yang perlu dipelajari di tengah-tengah pembangunan yang sedang kita laksanakan dewasa ini, adalah pembangunan dengan tekanan yang cenderung kepada satu aspek yaitu aspek ekonomi, apalagi aspek kebudayaan.

Proses kebekuan hati nurani akan pasti lahir di dalam masyarakat, bukan saja di kalangan yang sempit dan mampu menikmati kesejahteraan ekonomi akibat pembangunan, melainkan juga dapat terjadi pada masyarakat bawah atau pada masyarakat adat di negeri-negeri di pulau Ambon.

1. Sosial Budaya dan Kependudukan.

Adapun sosial budaya dan kependudukan yang terjadi di pulau Ambon pada khususnya terdiri dari berbagai suku, ras dan agama.

Yang mana terlihat begitu banyaknya bahasa daerah yang ada di pulau Ambon. Ada beberapa variasi ciri dan syarat-syarat susunan masyarakat adat pada negeri-negeri atau desa-desa di pulau Ambon, bila dianalisis lebih lanjut maka akan terbukti bahwa masyarakat adat dimaksud adalah suatu sistem sosial.

Faktor-faktor alam lingkungan dan faktor sosial bila dibicarakan melalui apa yang dikenal sebagai faktor Genealogis dan faktor Teritorial.

Kedua faktor ini benar-benar ada di dalam masyarakat adat di negeri-negeri di pulau Ambon, dan selalu ditemui bergandengan alias tidak terpisahkan di dalam masyarakat.

Dimana masyarakat adat yang bersifat Genealogis ialah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terkait dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa, mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama. Sedangkan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat Teritorial adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terkait dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu Teritorial atau daerah yang sama.

Ini adalah cara kehidupan masyarakat di pulau Ambon dengan struktur kehidupan sosial dan budaya.

Dari sudut kependudukan maka masyarakat di pulau Ambon pada umumnya berasal dari luar pulau Ambon, dan hampir sebagian besar masyarakat kota Ambon adalah pendatang.

Ada yang berasal dari pulau Lease, pulau Seram, pulau Jawa, pulau Sumatera, pulau Sulawesi, pulau Papua dan ada juga dari Cina.

Sedangkan penduduk pribumi banyak terdapat pada negeri-negeri atau desa-desa yang ada di pulau Ambon dengan sosial budayanya masing-masing.

2. Kegiatan Ekonomi Penduduk.

Kegiatan ekonomi penduduk bahkan masyarakat Kota Ambon dapat dibilang sangat sederhana yang didasarkan pada pekerjaan sehari-hari, dimana ada yang mengumpulkan hasil-hasil hutan bagi yang bermukim pada daerah pegunungan antara lain dari sektor pertanian.

Begitu pula hasil laut bagi yang tinggal pada daerah pesisir pantai antara lain sebagai nelayan.

Lagi pula kegiatan ekonomi yang lain adalah berdagang pada pasar-pasar tradisional, dimana masyarakat menjual hasil-hasil dagangannya demi kelangsungan hidup dari para keluarganya.

Ada pula yang menjadi pegawai negeri, ada pula yang berwiraswasta, bahkan ada pula yang menjual jasa.

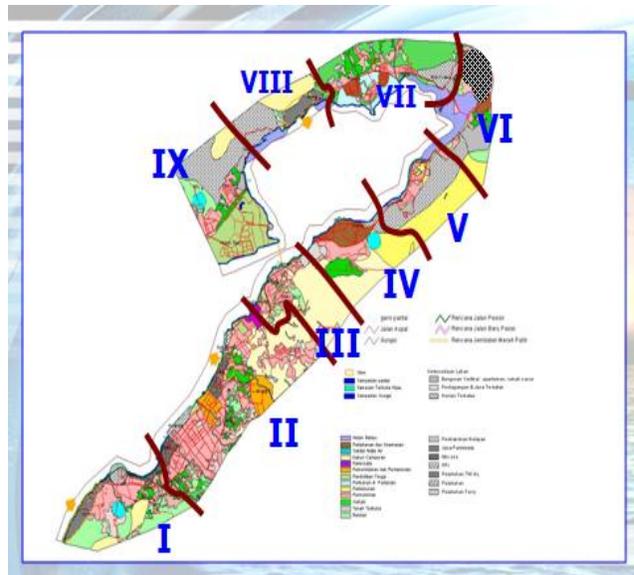
Karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia merupakan salah satu permasalahan utama yang dapat menjerumuskan kepada masalah kesejahteraan sosial ekonomi.

Permasalahan dimaksud dapat berupa masalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungan tidak layak, masalah psikologis, dan lain-lain masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial ekonomi la

V. Pengembangan Pesisir Kota Ambon Sebagai Kota Pantai (Water Front City)

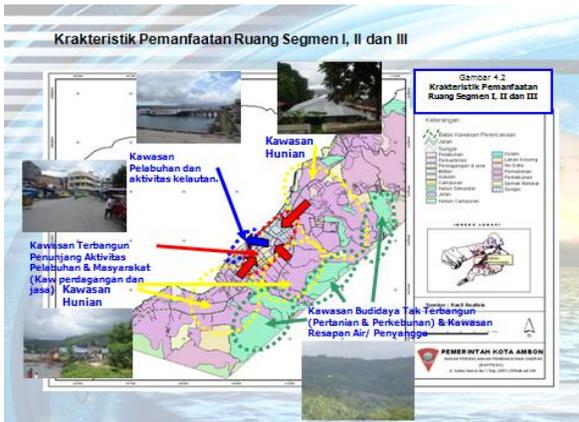
V.1 Hasil Dan Zonasi Pengembangan Wilayah Pesisir Kota Ambon

Didalam Hasil analisis dan Kajian Pengembangan Kota Ambon Sebagai Kota Pantai dapat direalisasi apabila dalam pengembangannya harus menjaga kawasan berfungsi lindung , a) Mengamankan / tidak mengganggu kawasan instalasi strategis, b) Memanfaatkan potensi keberagaman untuk menunjang pengembangan pesisir sebagai :. Kawasan jasa dan perdagangan, Kawasan permukiman, Kawasan pariwisata, Kawasan permukiman, Kawasan pendidikan, Kawasan pelabuhan dan transportasi laut, Kawasan pelayanan dan aksesibilitas. c) Menyeimbangkan pembangunan sektor modern – tradisional, dengan melestarikan budaya local, d) Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dalam penyelesaian pembangunan fisik . e) Menyiapkan jalur-jalur evakuasi dalam kondisi bahaya bencana alam (tsunami, gelombang pasang).

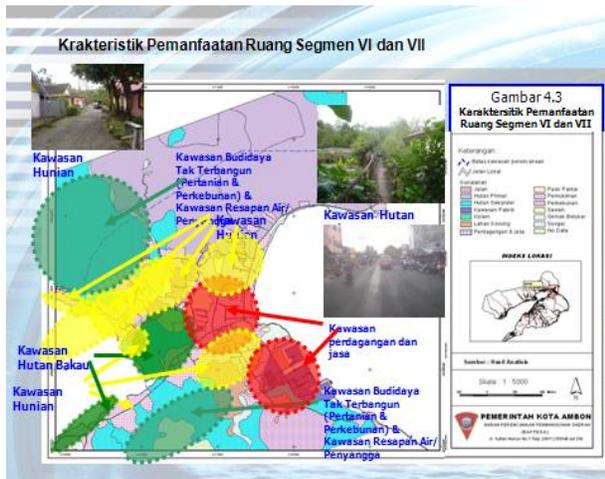


Gbr. 2 Pembagian Segmen Dalam Perencanaan

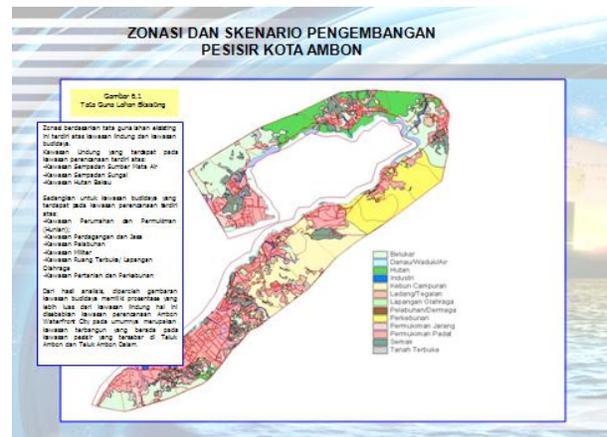
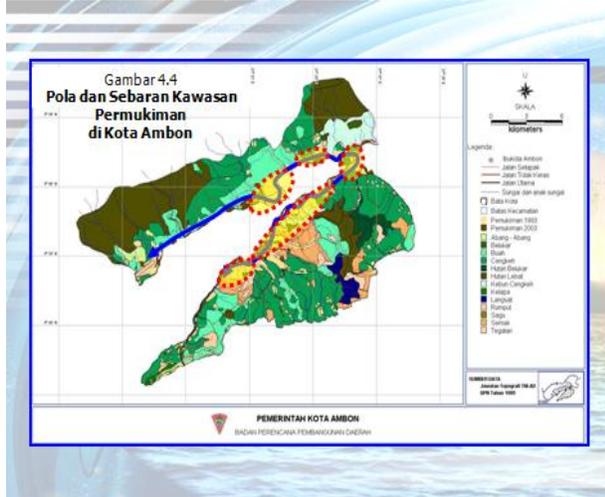
Gbr 3. Karakteristik Pemanfaatan Ruang Segmen I,II dan III



Gbr 4. Karakteristik Pemanfaatan Ruang Segmen VI dan VII



Gbr 5. Pola Dan sebaran Kawasan Pemukiman Kota Ambon

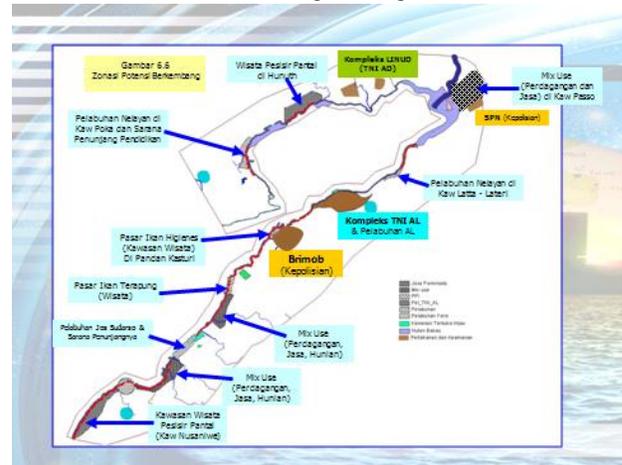


Gbr. 6 Tata Guna Lahan Eksiting

V.2. Zonasi Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir

Didalam kajian Perencanaan pengembangan wilayah pesisir Kota Ambon Sebagai Kota Pantai secara substansi dibagi berdasarkan zonasi Pengembangannya berdasarkan daya dukung ruang-ruang pesisirnya dan dapat dilihat sebagai berikut;

Gbr 7. Potensi Pengembangan Kawasan

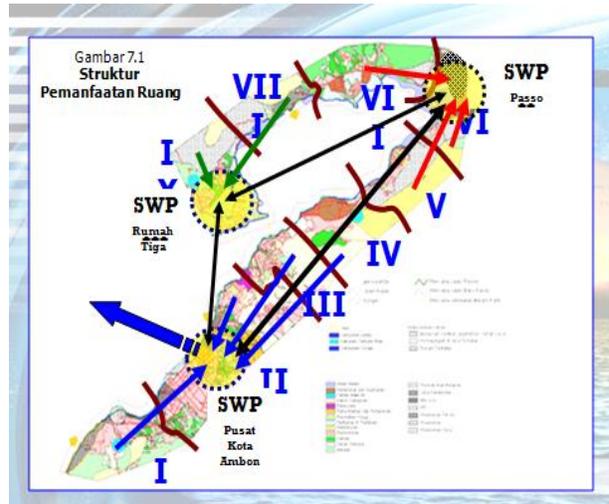


V.3 Rencana Tata Ruang Pesisir Pengembangan

Berdasarkan rencana struktur ruang Kota Ambon dalam RTRW Kota Ambon Tahun 2012 yang merupakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RENSTRA kota Ambon tahun 2006 - 2013 yang membagi wilayah Kota Ambon jadi 4 (empat) Satuan Wilayah Pengembangan, yakni:

1. SWP 1, sub wilayah pusat kota dan kilang dengan pusat pelayanan di Pusat Kota.
2. SWP II, sub wilayah Passo dan Hutumuri dengan pusat Pelayanan di Passo.
3. SWP III, sub wilayah Rumah Tiga dan Laha dengan pusat pelayanan di Rumah Tiga.
SWP IV, sub wilayah Latuhalat dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Amahusu

Gbr. 8 Struktur Pemanfaatan ruang Perencanaan



Tabel 1. Delineasi Kawasa Perencanaan

Delineasi Kawasan	Segmen	SWP
Kawasan Nusaniwe, Benteng, Wainitu, dan Waihaong	I	I
Kawasan Honipopu, Rijali, dan Batu Merah	II	
Kawasan Pandan Kasturi, Galala, dan Hative Kecil	III	
Kawasan Halong	IV	
Kawasan Latta dan Lateri	V	II
Kawasan Passo	VI	
Kawasan Negeri Lama, Nania, dan Waiheru	VII	
Kawasan Hunuth	VIII	III
Kawasan Tihu, Poka, dan Rumah Tiga	IX	

Sumber; Hasil analisis

VI. Kesimpulan

Berdasarkan studi kelayakan pengembang wilayah pesisir Kota Ambon sebagai water front city maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Pengembangan wilayah pesisir Kota Ambon sebagai water front city sesuai dengan kajian ini secara substansi layak dilaksanakan dengan mempertimbangkan Kecenderungan Perkembangan Kawasan Terbangun Kota Ambon, Fungsi dan Peranan Kawasan Pengamatan dalam Lingkup Wilayah Kota Ambon, Kemampuan dan Kesesuaian serta Daya Tampung Lahan , Daya Dukung Sosial Budaya dan Kependudukan, dan terlebih adalah zonasi perencanaan ruang dari kawasan pesisir pengembangan yang sesuai dengan arahan pengembangan rencana Tata Ruang Wilayah.

Daftar Pustaka

1. Anonimous, Keputusan Presiden No.62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional
2. Anonimous, Maluku Dalam Angka Tahun 2009
3. Sudharto P. Hadi, **Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan**, Gajah Mada University Press, 2001
4. Komar P.D,1976 **,Beach Process and Sedimentation** school of oceanografy,Oregon State University,New Jersey
5. Komar P.D,1984 **Computer Model of Shore Line Change** ”CRC,Hardbook of costal process and erotion,inc Boca Raton,Irlandia
6. Kota Ambon ,2001 , Rencana Strategis Kota Ambon Tahun 2006 – 2012

7. Pieter Th Berhita 2003, Studi Model Erosi Dan Sedimentasi Pantai Teluk Ambon, Majalah Ilmiah Terakreditasi Vol 15 No.3
8. Pieter Th Berhita 2004; Studi Kerusakan Habitat Mangrove Pada Pesisir Pantai Lateri Teluk Dalam Ambon, Prosiding Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi Kelautan, ISSN 1412 -2332, Oktober 2004
9. Pieter Th Berhita 2005 Studi Peramalan Gelombang Akibat Angin Pada Teluk Ambon Luar, Prosiding Lembaga Penelitian Unpatti ISBN No 2245
10. Pieter Th Berhita 2006, Analisa Pemanfaatan Lahan Pesisir Dan Pengaruhnya Terhadap Tata Ruang Wilayah Kota Ambon, Jurnal Perencanaan Wilayah
11. Pieter Th Berhita 2007, Studi Kerusakan Garis Pantai Amahusu – Eri Teluk Ambon Luar dan Pengaruhnya Terhadap Tata Ruang Kota Ambon, Prosiding Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi Kelautan SENTA 2007, Surabaya ITS 15 – 16 November 2007, ISBN 1412-2332 Page D151-169
12. Pieter Th Berhita 2008, "Studi Friction an Coastal Area Funtion And The Influence To Regional Planalogy Of Amboiana City", Makalah disampaikan pada seminar Internasional MARTEC 2008 di Universitas Indonesia, 26-27 Agustus 2008
13. Pieter Th Berhita 2008, Studi Kerusakan Wilayah Pesisir Kecamatan Nusaniwe Ambon Untuk Perencanaan Ttata Ruang Kota Ambon, Jurnal Teknologi Vol 5 No 2 Fakultas Teknik Unpatti
14. Pieter Th Berhita 2008 "Analisis Fisik Kerusakan Wilayah Pesisir Pantai Hatu- Liliboy Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Untuk Untuk Perencanaan Tata Ruang Pesisir, Jurnal Teknologi Vol 5 No 2 Oktober 2008 Fakultas Teknik Unpatti
15. Pieter Th Berhita 2009 " Experience Resource Managament Concept Regional Of Coastal Area And Go out To Sea Inwroughtly At Town Ambon In Suporting Area Competitiveness And Potenscy. Prosiding" Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi Kelautan. Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya ISSN 1412-2332, 17 Desember 2009